

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Metode Penelitian

Creswell (2016:4) menguraikan bahwa penelitian kualitatif yakni metode-metode untuk mendalami dan mengerti makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang diakui bersumber dari persoalan sosial atau kemanusiaan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2008:15) penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada *postpositivisme* yang sering dipakai untuk meneliti dalam keadaan obyektif yang alamiah dimana penulis memiliki kedudukan sebagai instrumen kunci.

Berdasarkan penjelasan di atas, metode deskriptif kualitatif dapat mendeskripsikan obyek penelitian ini sehingga cocok untuk penelitian ini. Penulis memilih metode ini untuk mendeskripsikan apa saja kendala dari PKL yang tidak mau mengikuti program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dan solusi dari pihak BPJS Ketenagakerjaan terhadap kendala dari PKL tersebut.

B. Informan

Dalam menentukan informan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pertimbangan tertentu dalam pengumpulan sampel sumber data. Pertimbangan tertentu yang dimaksud misalnya individu dipandang sangat tahu tentang informasi yang penulis inginkan sehingga membantu untuk menjelajahi situasi sosial yang diteliti (Sugiono, 2010). Menentukan informan dalam penelitian ini dilakukan saat penulis memasuki lokasi penelitian dengan cara memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan informasi yang tepat.

Informasi mengenai upaya BPJS Ketenagakerjaan untuk menarik minat PKL di Pasar Bantengan agar mau ikut kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan diperoleh melalui wawancara dengan Pak Anik Zukri dari Divisi Kepesertaan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta. Pak Eko dan Pak Sarjiman diwawancarai sebagai narasumber untuk mendapatkan data tentang Pasar Bantengan. Selain itu

wawancara terbuka juga akan dilakukan kepada 5 (Lima) orang Pedagang Kaki Lima di Pasar Bantengan. Pemilihan 5 orang PKL ini dilakukan dengan kriteria pedagang sudah menjadi PKL lebih dari 10 tahun. Alasan dipilihnya PKL yang sudah berdagang selama 10 tahun adalah karena pengetahuan dan pengalamannya bekerja sebagai PKL lebih banyak dibandingkan dengan yang masih baru menjadi PKL. Selain itu PKL yang dipilih adalah PKL yang sudah tahu tentang program BPJS Ketenagakerjaan tapi tidak mau ikut kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Kelima informan tersebut terdiri dari Ibu Ika, Ibu Rusneli, Ibu Kris, Ibu Yulis, dan Ibu Mahmuda.

Penulis memilih PKL di kawasan Pasar Bantengan, karena banyaknya jumlah PKL di Bantengan sehingga PKL yang termasuk dalam kawasan Pasar Bantengan saja yang menjadi informan dalam penelitian ini. Selain itu dipilihnya Pasar Bantengan dibandingkan pasar lain karena Pasar Bantengan belum mendapatkan sosialisasi dari BPJS Ketenagakerjaan secara langsung seperti halnya PKL di Pasar Sleman. Alasan penulis memilih lima orang PKL adalah perempuan sebagai informan, karena keterbatasan waktu penulis yang mengakibatkan penulis tidak tahu berapa jumlah PKL yang memenuhi kriteria informan. Penulis memilih secara acak dari PKL yang memenuhi kriteria informan dan penulis memilih PKL yang bersedia menjadi informan.

C. Operasionalisasi Konsep

Penelitian ini menggunakan teori Jaminan Sosial dari Guy Standing. Guy Standing menjelaskan bahwa jaminan sosial merupakan satu sistem yang memberikan jaminan pembiayaan pada saat terjadi risiko yang tidak terduga seperti risiko penyakit seumur hidup, bersalin, masa tua, kecelakaan saat bekerja, pengangguran, cacat dan kematian dengan memberikan pemeliharaan kesehatan, dan bantuan keuangan bagi keluarga yang mempunyai anak-anak. Penelitian ini hanya menggunakan dua risiko dari sekian banyak risiko yang dikemukakan Guy Standing karena BPJS Ketenagakerjaan mencakup hanya JKK dan JKM yang sifatnya wajib. Dua risiko yang digunakan dalam penelitian ini adalah jaminan kecelakaan saat bekerja dan jaminan kematian. Selain itu penelitian ini menggunakan pengertian dari Poerwadarminta tentang upaya merupakan semua

yang berbentuk mengusahakan pada sesuatu hal agar bisa lebih berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan manfaat, fungsi, tujuan, dan yang dimaksud suatu hal tersebut dilakukan. Terakhir penelitian ini menggunakan pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang kendala merupakan halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran.

Penggunaan konsep tersebut berguna untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini, yaitu apa saja kendala PKL di kawasan Pasar Bantengan untuk menjadi peserta program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dan apa saja upaya BPJS Ketenagakerjaan untuk menarik minat para PKL agar mau menjadi peserta program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.

D. Metode Pengumpulan Data, Jenis Data, Analisis Data

D.1 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang dilakukan untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah aktivitas sehari-hari seseorang dengan memanfaatkan pancaindra mata untuk alat bantu utamanya, serta pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit (Bungin, 2007:118). Observasi menurut Sugiyono (2012) adalah teknik pengumpulan data yang memiliki ciri khas berhubungan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan jumlah informan yang diamati tidak terlalu besar. Pada observasi ini, penulis mengamati situasi yang terjadi di lapangan dengan mencatat dan mendokumentasikan hal-hal yang dianggap penting untuk tercapainya tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis terjun langsung ke lokasi penelitian dengan cara menggali informasi untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Observasi ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala bagi Pedagang Kaki Lima dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

2. Wawancara

Wawancara adalah dialog dengan tujuan spesifik yaitu dialog antara dua orang dimana pewawancara yang memberikan pertanyaan dan informan yang

memberikan jawaban (Moleong, 2007:186). Wawancara yang dipakai untuk penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur untuk mendapatkan persoalan dengan cara lebih terbuka, informan dapat diminta untuk mengemukakan pendapat dan idenya (Esterberg dalam Sugiyono, 2015:73).

Tahapan-tahapan wawancara semi terstruktur yang akan dilakukan oleh penulis untuk melakukan pengumpulan data yaitu:

1. Membuat pedoman pertanyaan wawancara supaya pertanyaan yang diajukan sama dengan tujuan wawancara tersebut.
2. Menetapkan informan wawancara.
3. Memilih lokasi dan waktu wawancara.
4. Mejalankan proses wawancara.
5. Dokumentasi dan merekam suara saat proses wawancara berlangsung.
6. Memastikan hasil wawancara sesuai dengan informasi yang diperlukan oleh penulis.
7. Merekap hasil wawancara.

Penulis melakukan wawancara dengan Pak Eko selaku Ketua Pasar dan Pak Sarjiman selaku Operasional Pasar. Mereka berdua diwawancarai sebagai narasumber untuk mendapatkan data tentang Pasar Bantengan. Penulis melakukan wawancara dengan Pak Anik Zukri dari Divisi Kepesertaan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta, juga kepada 5 (lima) orang Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk mendapatkan data penelitian. Wawancara terhadap PKL di Pasar Bantengan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang apa saja kendala dari PKL yang menyebabkan mereka tidak mau mendaftarkan diri pada program BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan wawancara terhadap Pak Anik Zukri dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang upaya BPJS Ketenagakerjaan untuk menarik minat PKL mengikuti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah terjadi dan tersedia dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen meningkatkan kepercayaan atau kredibel sebuah hasil dari wawancara atau observasi (Sugiyono, 2016: 240). Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah arsip, artikel dan gambar-gambar tentang program kepesertaan BPU

dari BPJS Ketenagakerjaan, serta arsip dan gambar-gambar tentang keadaan PKL (Pedagang Kaki Lima) dari pihak Pengelola Pasar.

D.2 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder. Berikut adalah penjelasan dari data primer dan data sekunder:

1) Data primer

Menurut Sugiyono (2012:139) data primer adalah sumber data yang berlangsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan mewawancarai pedagang kaki lima di kawasan Pasar Bantengan. Sedangkan observasi dilaksanakan di kawasan Pasar Bantengan dan BPJS Ketenagakerjaan.

2) Data sekunder

Menurut Sugiyono (2012:141) data sekunder adalah sumber data yang didapatkan melalui cara membaca, belajar, dan memahami dengan media lain yang berasal dari literatur, buku-buku, serta dokumen. Data sekunder didapatkan melalui website dan dokumen berupa materi-materi yang tertulis yang tersimpan di BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta dan di kawasan Pasar Bantengan berupa arsip atau dokumen.

D.3 Analisis Data

Data-data dalam penelitian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis menurut Miles dan Huberman (1992)⁹:

1) Pengumpulan data

Langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan data penelitian berupa hasil wawancara, observasi serta dokumentasi di lapangan.

2) Reduksi data

⁹ Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru.* (Jakarta: UIP, 1992). hal. 90.

Reduksi data yaitu proses penentuan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan pengubahan data kasar yang ada dari catatan tertulis yang didapatkan selama di lapangan.

3) Penyajian Data

Penyajian data, yaitu kegiatan menyajikan data hasil penelitian sehingga penulis dapat mengambil kesimpulan sementara dan dapat merencanakan tindakan berikutnya jika ternyata tetap terdapat data yang tidak lengkap, perlu klarifikasi, atau belum pernah diproses.

4) Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan dapat menampilkan deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Sedangkan verifikasi adalah upaya untuk mencari, menguji, mengecek kembali atau memahami makna atau arti, keteraturan, penjelasan, pola-pola, alur, sebab-akibat, atau preposisi.

E. Deskripsi Obyek dan Subyek Penelitian

E. 1 Profil Pasar Bantengan¹⁰

Berdirinya Pasar Bantengan diawali dari beberapa penduduk setempat yang berjualan makanan, seperti bubur, gubahan, dan pecel. Kemudian penduduk setempat menyebutnya dengan Pasar Bantengan. Seiring berjalannya waktu, banyak pedagang yang bukan merupakan penduduk setempat mulai berjualan di sepanjang jalan. Para pedagang tersebut berasal dari Wonosari, Piyungan, Kulon Progo, dan Bantul. Pasar Bantengan tidak mempunyai bangunan melainkan pasar tiban yang terletak di lingkungan tempat tinggal Desa Bantengan, tepatnya di pinggir jalan Desa Bantengan. Oleh karena itu para pedagang di Pasar Bantengan dapat dikategorikan sebagai Pedagang Kaki Lima yang berdagang di depan pemukiman penduduk.

Pasar Bantengan berdiri sejak tahun 1977. Pasar ini bukan diurus oleh pemerintah melainkan diurus oleh pengurus pasar. Oleh karena itu PKL akan membayar uang sewa per hari sebesar Rp 5.000,00 sampai dengan Rp 7.000,00

¹⁰ Diolah dari hasil wawancara dengan Pak Sarjiman sebagai Operasional di Pasar Bantengan, tanggal 8 Desember 2021.

kepada pemilik rumah yang bagian depan rumahnya digunakan oleh PKL sebagai lahan untuk berjualan. PKL yang berjualan di Pasar Bantengan memiliki kartu anggota sebagai bukti kepemilikan lahan untuk jualan, sehingga jika ada masalah akibat perebutan lahan tersebut dapat diatasi dengan bukti kepemilikan lahan. Selain itu jika ada pihak luar yang mencari PKL, dapat dengan mudah dicari keberadaannya dengan kartu anggota. Meskipun Pasar Bantengan tidak diurus oleh pemerintah, namun pengurus pasar bekerjasama dengan Pak Lurah memberikan pelayanan petugas mengatur lalu lintas kepada pedagang dan pembeli di Pasar Bantengan. Hal tersebut dilaksanakan setiap hari Sabtu dan Minggu saat lalu lintas di Pasar Bantengan sering kali ramai oleh pejalan kaki maupun pengendara motor dan pengendara mobil.

Pak Eko selaku Ketua Pasar dan Pak Sarjiman selaku Operasional Pasar memberikan informasi bahwa pedagang di Pasar Bantengan terbagi dalam 4 blok, yakni blok A, blok B, blok C, dan blok D. Hingga saat ini pedagang yang berjualan sampai 246 orang pedagang. Pedagang yang berjualan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1: Daftar Jenis Pedagang di Pasar Bantengan

No	Jenis Dagangan	Jumlah Pedagang
1.	Penggilingan Kelapa	5 orang
2.	Penjual Pakaian dan Tas	12 orang
3.	Penjual Accesoris	9 orang
4.	Toko Bahan Kue dan Roti	5 orang
5.	Toko Sembako	8 orang
6.	Toko Grosir	5 orang
7.	Mini Market	1 orang
8.	Penjual Ikan Laut	11 orang
9.	Penjual Ayam	22 orang
10.	Penjual Daging	10 orang
11.	Penjual Sayuran	38 orang
12.	Klontong	11 orang
13.	Penjual Makanan	32 orang
14.	Warung Makan	20 orang
15.	Penjual Bumbu Dapur	7 orang
16.	Penjual Tempe dan Tahu	45 orang
17.	Jajanan Pasar	4 orang
Jumlah Total		246 orang

Sumber: Olah data dari Pak Eko sebagai Ketua Pasar Bantengan 8 Desember 2021

Tabel 2 menunjukkan bahwa ada 246 orang pedagang yang mana 169 orang di antaranya Pedagang Kaki Lima (PKL)¹¹. PKL di Pasar Bantengan yang merupakan informan dalam penelitian ini, yaitu Ibu Ika, Ibu Kris, Ibu Yulis, Ibu Mahmuda, dan Ibu Rusneli.

E.2. Profil Pedagang Kaki Lima

Informan dalam penelitian ini adalah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang sudah berjualan lebih dari 10 tahun sehingga PKL tersebut memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan pekerjaannya. Selain itu PKL sudah mengetahui tentang BPJS Ketenagakerjaan namun memiliki kendala untuk mengikuti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Berikut daftar informan dalam penelitian ini:

Tabel 2: Daftar Informan

NO	Nama PKL	Jenis Dagang	Lamanya
1	Ibu Ika	Ikan Laut	25 tahun
2	Ibu Rusneli	Es Cendol	15 tahun
3	Ibu Kris	Gas Elpiji	15 tahun
4	Ibu Yulis	Gorengan	14 tahun
5	Ibu Mahmuda	<i>Snack/jajanan</i>	15 tahun

Sumber: hasil wawancara dengan PKL di Pasar Bantengan pada 28 Juni 2021

Berikut merupakan profil singkat dari informan:

1) Ibu Ika

Ibu Ika berusia 48 tahun yang bekerja menjadi PKL di Pasar Bantengan bersama suaminya selama 25 tahun. Jenis dagangannya adalah ikan laut dengan penghasilan kotornya kurang lebih Rp 400.000,00 sampai dengan Rp 600.000,00 per hari. Ibu Ika sudah menikah dan memiliki rumah sendiri, serta mempunyai tiga orang anak, terdiri dari dua anak masih sekolah di SMA dan satu anak yang sudah menikah. Jumlah seluruh anggota keluarga adalah lima orang yang terdiri dari istri, suami, dan tiga orang anak. Ibu Ika memiliki tanggungan dua orang anak.

¹¹ Diolah dari data Pak Eko sebagai Ketua Pasar di Pasar Bantengan, 11 Februari 2022.

2) Ibu Kris

Ibu Kris berusia 54 tahun yang bekerja menjadi PKL di Pasar Bantengan bersama suaminya selama 15 tahun. Jenis dagangannya adalah bensin eceran, es batu, dan gas dengan penghasilan Rp 1.500.000,00 sampai dengan 2.000.000,00 per bulan. Ibu Kris sudah menikah dan memiliki rumah sendiri serta mempunyai satu orang anak yang sedang kuliah semester 6 di Sanata Dharma. Jumlah seluruh anggota keluarga adalah empat orang, yang terdiri dari suami, istri, satu orang anak, dan mertua. Ibu Kris memiliki tanggungan satu orang anak dan mertua.

3) Ibu Yulis

Ibu Yulis Setianingsih berusia 40 tahun yang bekerja menjadi PKL di Pasar Bantengan bersama suaminya selama 14 tahun. Jenis dagangannya adalah gorengan dan kelapa muda. Penghasilannya dulu dan sekarang berbeda, kalau dulu penghasilannya banyak karena yang jualan kelapa belum banyak sedangkan sekarang penghasilannya menurun karena sudah banyak yang jualan kelapa, jadi rata-rata pendapatan bersih Rp 3.000.000,00 per bulan. Ibu Yulis sudah menikah dan memiliki rumah sendiri serta mempunyai dua orang anak yang terdiri dari satu kelas tiga SMA dan satunya kelas 5 SD. Jumlah seluruh anggota keluarga adalah 4 orang yang terdiri dari istri, suami, dan dua orang anak. Ibu Yulis memiliki tanggungan dua orang anak.

4) Ibu Mahmuda

Ibu Mahmuda berusia 54 tahun yang bekerja sebagai PKL di Pasar Bantengan selama 15 tahun. Sedangkan suaminya bekerja menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil). Jenis dagangan Ibu Mahmuda adalah *snack* dengan penghasilan tidak menentu, kalau sepi pembeli di atas Rp 2.000.000,00 di bawah Rp 3.000.000,00 per bulan. Ibu Mahmuda sudah menikah dan memiliki rumah sendiri serta mempunyai dua orang anak yang terdiri dari satu anak kuliah semester 6 di UGM dan satu anak sudah kerja di Telkom. Jumlah seluruh anggota keluarga adalah empat orang yang terdiri dari istri, suami, dan dua orang anak. Ibu Mahmuda memiliki tanggungan satu orang anak.

5) Ibu Rusneli

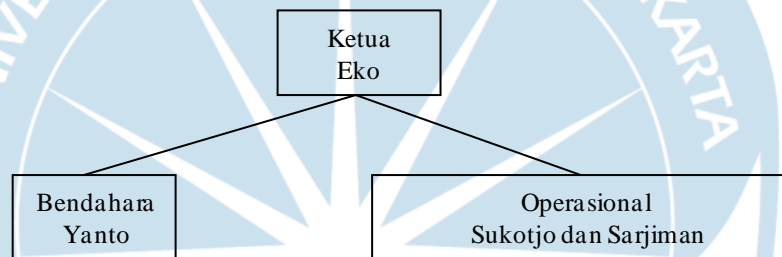
Ibu Rusneli berusia 45 tahun yang bekerja sebagai PKL di Pasar Bantengan bersama suaminya selama 15 tahun. Jenis dagangannya cendol dengan

penghasilan tidak menentu, kurang lebih Rp 2.000.000,00 per bulannya, tapi kalau musim hujan penghasilan berkurang karena pembelinya sepi. Ibu Rusneli sudah menikah dan memiliki rumah sendiri serta mempunyai 3 orang anak yang terdiri dari dua orang masih sekolah SMP dan satu lagi sudah bekerja di Pizza Hut. Jumlah seluruh anggota keluarga adalah lima orang yang terdiri dari istri, suami, dan tiga orang anak. Ibu Rusneli memiliki tanggungan dua orang anak.

E.3 Struktur Organisasi Pasar Bantengan

Secara ringkas struktur organisasi Pasar Bantengan dapat dilihat pada Bagan 2 berikut ini:

Bagan 2. Struktur Organisasi Pasar Bantengan



Sumber: Hasil wawancara dengan Pak Eko, 8 Desember 2021

Berikut merupakan penjelasan singkat mengenai tugas dari tiap pengurus:

1. Ketua. Tugas ketua yakni mengkoordinasi pelaksanaan suatu kegiatan di Pasar Bantengan, mengumpulkan iuran dari PKL, menjaga kebersihan, menjalin komunikasi dengan Pak Lurah, mendata pedagang di Pasar Bantengan.
2. Bendahara. Tugas bendahara yakni menyimpan iuran dari PKL, menyusun anggaran suatu kegiatan di Pasar Bantengan, mengumpulkan iuran dari PKL, menjaga kebersihan.
3. Operasional. Tugas operasional yakni membuat kartu PKL di Pasar Bantengan, menyelesaikan permasalahan pedagang yang rebutan lahan untuk jualan di Pasar Bantengan, mempersiapkan suatu kegiatan di Pasar

Bantengan, menjalankan suatu kegiatan di Pasar Bantengan, mengumpulkan iuran dari PKL, menjaga kebersihan.¹²

E.4 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

E.4.1 Profil BPJS Ketenagakerjaan

Sejarah BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan diawali dengan berdirinya PERUM (Perusahaan Umum) ASTEK (Asuransi Sosial Tenaga Kerja) pada tahun 1977 yang merupakan awal pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) untuk mengikuti program ASTEK. Lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) menetapkan PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja untuk memberikan perlindungan dasar dalam memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya serta memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang akibat risiko sosial.

PT Jamsostek (Persero) terus berkiprah mengedepankan kepentingan tenaga kerja Indonesia dan keluarganya dengan menyediakan 4 (empat) program perlindungan yang terdiri dari program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) hingga ditetapkannya UU No.24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pada tanggal 1 Januari 2014 PT Jamsostek menjadi Badan Hukum Publik yang bertransformasi menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan yang tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja yang meliputi JKK, JKJ, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun (JP) mulai 1 Juli 2015.

¹² Diolah dari hasil wawancara dengan Pak Sarjiman sebagai Operasional di Pasar Bantengan, tanggal 8 Desember 2021.

E.4.2 Visi dan Misi BPJS Ketenagakerjaan¹³

Visi dan misi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :

E.4.2.1 Visi

Visi BPJS Ketenagakerjaan adalah “menjadi badan penyelenggara jaminan sosial kebanggaan bangsa, yang amanah, bertata kelola baik serta unggul dalam operasional dan pelayanan”.

E.4.2.2 Misi

Melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk:

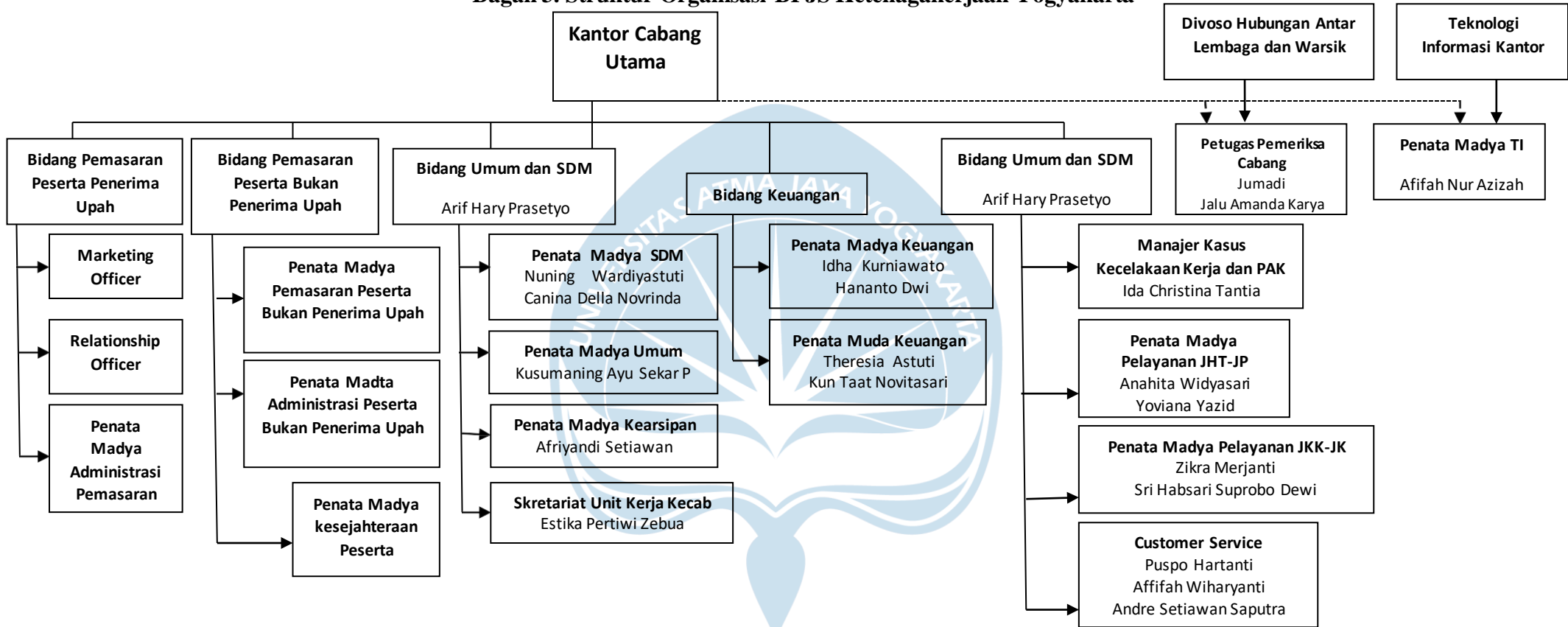
1. Melindungi dan menyejahterakan seluruh pekerja dan keluarganya.
2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja.
3. Mendukung pembangunan dan kemandirian perekonomian nasional.

E.4.2.3 Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta

Secara ringkas struktur organisasi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan Yogyakarta dapat dilihat pada Bagan 3 berikut ini:

¹³ Visi misi BPJS Ketenagakerjaan diperoleh melalui situs <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/page/profil/Visi-dan-Misi.html>. Situs diakses pada tanggal 2 Februari 2022.

Bagan 3. Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta



(Sumber: Data dari HRD BPJS Ketenagakerjaan KCP DIY, 02 Februari 2022)

BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan Yogyakarta membagi tugas pelayanannya dalam beberapa divisi yaitu¹⁴:

1. Divisi Bidang Pemasaran Peserta Penerima Upah

Divisi Bidang Pemasaran Peserta Penerima Upah mempunyai tugas untuk merencanakan program dan pengelolaan melalui program *Customer Relationship Management* (CRM) dan membina kinerja Divisi Relationship Officer (RO), serta mengendalikan pelayanan administrasi kepesertaan untuk memastikan target kepesertaan dan iuran di cabang tercapai dengan efektif dan efisien.

2. Divisi Bidang Pemasaran Bukan Penerima Upah

Divisi Bidang Pemasaran Bukan Penerima Upah mempunyai tugas untuk merencanakan, mengoordinasikan, mengarahkan, dan mengelola program pemasaran peserta bukan penerima upah dan jasa konstruksi di kantor cabang yang selaras strategi pemasaran wilayah, memantau dan membina kinerja dengan Divisi Relationship Officer (RO) serta mengendalikan pelayanan administrasi kepesertaan, guna memastikan target kepesertaan serta iuran di Bidang Jasa Konstruksi dan Bukan Penerima Upah dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

3. Divisi Bidang Keuangan

Divisi Bidang Keuangan berfungsi untuk memantau dan mengoordinasikan kegiatan yang terkait dengan pengelolaan keuangan di kantor cabang guna memberikan dukungan pada aspek keuangan bagi kegiatan operasional yang efektif dan efisien.

4. Divisi Bidang Pelayanan

Divisi Bidang Pelayanan mempunyai tugas untuk merencanakan, mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pelayanan program JHT (Jaminan Hari Tua), JP (Jaminan Pensiun), JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), dan JKM (Jaminan Kematian), serta mengoordinasikan penyelesaian kasus terdiagnosa KK-PAK (Kecelakaan Kerja-Penyakit Akibat Kerja) di lingkungan operasional kantor cabang. Divisi ini juga bertugas mengoordinasikan kegiatan pelayanan bagi peserta dilakukan dengan cara memantau pengumpulan data/dokumen peserta, memastikan proses verifikasi

¹⁴ Diolah dari data HRD BPJS Ketenagakerjaan KCP DIY, 2 Februari 2022.

dokumen telah sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur), menetapkan besaran jaminan sesuai batas kewenangannya, memantau proses penyelesaian klaim agar tepat waktu, dan juga menyelesaikan masalah yang timbul akibat kasus klaim yang tertunda. Hal ini dilakukan untuk memastikan kegiatan pelayanan berlangsung lancar dan memenuhi standar kualitas yang ditentukan.

5. Divisi Penata Madya Teknologi Informasi (TI)

Divisi Penata Madya Teknologi Informasi (TI) mempunyai tugas untuk melaksanakan pengaturan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan *hardware*, *software*, jejaring dan layanan TI di kantor cabang, guna mengoptimalkan pengoperasian perangkat dan layanan serta memperkaya, mengelola, menganalisa data, informasi dan pengetahuan untuk memberikan pelayanan yang cepat dan akurat kepada peserta sebagai fondasi kestabilan operasional serta kecepatan pengambilan keputusan.

6. Divisi Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia

Divisi ini mempunyai tugas untuk memantau dan mengoordinasikan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa, aset dan pelayanan umum bagi karyawan (seperti rumah tangga, kebersihan, keamanan, kearsipan, dan lain-lain), dan juga mengoordinasi kegiatan pemeliharaan arsip dengan cara menyimpan berkas, merapikan dan merekap berkas asli maupun *softfile* untuk pengamanan arsip. Divisi ini juga bertanggung jawab pada hubungan komunikasi dengan pihak internal dan eksternal, guna memberikan dukungan pada aspek sumber daya manusia dan umum bagi kelancaran kegiatan bisnis di kantor cabang.

7. Divisi Pemeriksa Cabang 1

Divisi Pemeriksa Cabang 1 mempunyai tugas untuk menyusun usulan dan melaksanakan program kerja pengawasan dan pemeriksaan tahunan di unit kerjanya, mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan kantor maupun pemeriksaan lapangan kepada pemberi kerja; menyusun, mengevaluasi dan me-*review* kembali laporan dan menyiapkan sanksi administratif berupa surat teguran, denda dan surat rekomendasi tidak mendapat pelayanan publik tertentu; berkoordinasi dengan instansi untuk melakukan penindakan dan mekanisme

pencabutannya; guna mendukung kelancaran kegiatan pengawasan dan pemeriksaan program jaminan sosial ketenagakerjaan secara optimal.

